

ANALISIS KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENGGUNAAN DRONE/UAV DI SURIAH TAHUN 2013

Ibnu Ansyorullah¹
NIM. 1502045027

Abstract: *US is involved in the Syrian Conflict based on the humanitarian principles of chemical weapons used by Bassar Al Assad and the Counterterrorism policy against ISIS and Al-Qaeda. Despite criticism of the civilian casualties, the US continues to use drones in Syria. This study aims to analyze and explain the reasons for the use of drones by the United States during the Syrian Conflict in 2013. The research method used is explanatory with secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The theory used is Political Realism. The results of this study indicate that the US Government's interest in the use of drones leads to economic interests, while military interests and political interests are supporting the success of drone promotion. However, these three interests is aim to increase power.*

Keywords: *Drone, Military Interests, Political Interests, Economic Interests, Political Realism.*

Pendahuluan

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dikenal sebagai *drone* merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat ini dikendalikan pilot yang berada di daratan atau di kendaraan lainnya atau secara otomatis melalui program komputer yang dirancang. Sistem otomatis (*autonomous*) kini mulai banyak diterapkan yaitu dengan cara kendali dari *software* yang digabungkan dengan *Global Positioning System* (GPS) (Suroso, 2006).

Era penggunaan *drone* modern terjadi pada 1959 pada perang antara AS dengan Vietnam hingga tahun 1991. Pada era ini, *drone* digunakan dengan fungsi sebagai alat pengintai hingga mampu menjadi sebuah pemasok senjata. Fungsi fisik *drone* juga bertambah dengan adanya komponen kamera untuk misi pengintaian yang lebih mudah masuk kewilayah musuh (agendrone.com, diakses 26 Januari 2019).

Kecanggihan teknologi *drone* juga berimbas penggunaan *drone* dalam kehidupan sosial/sipil, seperti pemetaan wilayah, mencari korban bencana alam, perawatan infrastruktur, jurnalisme, pertanian hingga perfilman (nationalgeographic.grid.id, diakses 10 Februari 2019). Meski dianggap berkontribusi terhadap keperluan sipil, kemajuan teknologi *drone* memunculkan perhatian tersendiri, karena fungsi *drone* yang telah berubah menjadi varian senjata yang sangat mematikan.

Penggunaan *drone* oleh AS aktif kembali digunakan ketika presiden George W. Bush, mendeklarasikan kontraterorisme dan *War on Terror*, pasca kejadian serangan teroris yang telah meruntuhkan menara kembar *World Trade Center* (WTC) di kota New York, 20 September 2001 (Bhaskara, 2018). Sejak dicetuskannya *Counterterrorism* dan *War on Terror*, AS terlibat perang dan kontak senjata di Pakistan, Afghanistan, Somalia, Yaman, Libya, Irak dan Suriah. Untuk keperluan perang ini, AS telah mengerahkan sebanyak 10.691 *drone*, sejak 2001 hingga 2013 (www.military.com, diakses 4 Desember 2018).

Militer AS juga menggunakan *drone* pada perang di Suriah tahun 2013. AS masuk kedalam konflik Suriah pada saat adanya dugaan penggunaan senjata kimia di pinggiran kota Damaskus oleh rezim Bashar Al-Assad yang menewaskan ratusan warga sipil

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : Ibnuansyorullah@gmail.com

(Fahham & Kartaatmaja, 2014). Intervensi AS pada konflik tersebut dilakukan dengan menurunkan angkatan udaranya, termasuk 2 jenis *drone* yaitu *MQ-1 Predator* dan *MQ-9 Reaper* (Sanchez & Sherlock, 2014).

Dalam kasus Suriah tahun 2013 ini, AS pertama kalinya mengumumkan penggunaan *drone* kepada dunia. Hal ini disampaikan oleh Barrck Obama pada tanggal 23 Mei 2013 bertempat di *National Defense University*, pada kesempatan ini dalam pidatonya membahas mengenai *counterterrorism* dan kebijakan transparansi penggunaan *drone*. Tujuan diumumkannya penggunaan *drone* atau transparansi ini adalah upaya ini menjawab kritik yang meminta agar pemerintahan Obama bersikap lebih transparan terkait program yang dinilai banyak pihak melanggar HAM ini, baik dari segi target, korban dan cara penggunaannya (www.nytimes.com, diakses 1 Februari 2021).

Letta Tayler (*senior terrorism and counterterrorism researcher*) dari *Human Rights Watch* yang menyebutkan bahwa serangan *drone* di Suriah yang menimbulkan jatuhnya korban sipil. Diketahui jumlah korban sipil di Suriah mencapai 685 warga sipil dan angka ini diyakini merupakan korban salah tembak *drone* yang telah dilakukan oleh AS (www.hrw.org, diakses 15 Mei 2019). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan *drone* di Suriah, dampak dari penggunaan tersebut hingga kepentingan yang melatar belakangi keberadaan AS di Suriah.

Kerangka Teori

Political Realism

Realisme percaya bahwa kekuasaan adalah unsur penting dalam politik internasional. *Power* merupakan aktor utama dalam realisme dengan melihat kemampuan ekonomi dan kekuatan militer tiap negara. Namun juga sangat penting bila tidak hanya mempertimbangkan jumlah kekuatan yang besar, tetapi juga untuk mempertimbangkan kekuatan dari negara lain yang dapat menjadi ancaman (Dunne, Kurki & Smith, 2013).

Hans J. Morgenthau mendasarkan pemikirannya pada sikapnya terhadap beberapa hal yaitu bahwa kodrat manusia sebagai secara esensial tidak berubah dan haus akan kekuatan (*power*). Politik internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan kekuasaan dan negara mendefinisikan kepentingan nasional mereka dalam batasan-batasan *power* adalah penting dan sebagai sentral *balance of power*, dan politik adalah wilayah aksi yang berbeda dan otonom (Morgenthau, 1985). Morgenthau (1948) menuliskan ada enam prinsip dari perspektif realisme, yaitu:

- a. Pertama, bahwa seperti aspek-aspek kehidupan lain, politik diatur oleh hukum-hukum objektif yang berasal dari naluri manusia. Untuk mengatur masyarakat pertama-tama perlu memahami hukum-hukum naluri itu. Hukum-hukum objektif itu perlu di ikuti, karena menentangnya hanya akan menemui risiko gagal. Objektivitas memungkinkan pengembangan teori yang rasional. Perbedaan perlu dilakukan antara kebenaran (apa yang benar secara objektif dan rasional yang didukung oleh bukti dan diterangi oleh akal) dan opini (apa yang hanya penilaian subjektif yang didasari rasa curiga dan *wishful thinking*).
- b. Kedua, politik internasional harus dikaitkan dengan konsep kepentingan (*interests*) yang didefinisikan dalam batasan *power*. Konsep ini menyediakan kaitan antara akal yang berusaha memahami politik internasional dan fakta-fakta untuk dipahami. Politik adalah ruang otonom yang dipahami secara berbeda dari ruang-ruang lainnya, seperti ekonomi, etika, estetik, dan agama. Tanpa melihat politik sebagai ruang otonom, maka teori politik tidak mungkin dibangun, karena

- tidak bisa dibedakan antara fakta-fakta politik dan non politik, dan juga tidak bisa diukur tatanan sistematis pada bidang politik.
- c. Ketiga, kepentingan yang didefinisikan sebagai *power* adalah kategori objektif yang valid secara universal, tetapi tidak memiliki makna yang tetap. Ide tentang kepentingan memang esensi dari politik dan tidak terpengaruh oleh ruang-ruang lingkup waktu dan tempat.
 - d. Keempat, moral memang bisa mempengaruhi tindakan politik, tetapi kebijaksanaan menjadi kebijakan tertinggi dalam politik. Untuk itu, harus dibedakan antara tuntutan moral dan syarat-syarat tindakan politik yang berhasil. Prinsip-prinsip moral universal tidak bisa diterapkan ke tindakan-tindakan negara dalam formulasi universal yang abstrak, tetapi bahwa mereka harus disaring dalam waktu dan tempat yang konkrit. Etika yang abstrak menilai tindakan menurut kesesuaiannya dengan hukum moral, etika politik menilai tindakan dari akibat-akibat politiknya.
 - e. Kelima, menolak untuk mengidentifikasi aspirasi moral dari negara tertentu dengan hukum moral universal. Ada perbedaan antara kebenaran dan pendapat, semua negara memiliki kepentingan dan beberapa telah berhasil menahan kepentingan itu sekian lama untuk menutupi aspirasi-aspirasi dan tindakan-tindakan khusus mereka dalam tujuan-tujuan moral yang universal. Mengetahui negara-negara itu sebagai subjek bagi hukum moral adalah satu hal, sementara berpura-pura mengetahui dengan penuh keyakinan tentang apa yang baik dan buruk dalam hubungan antarnegara adalah hal yang lain.
 - f. Keenam, perbedaan antara realisme politik dan teori pemikiran yang lain adalah riil dan jelas. Secara intelektual, realis politik mempertahankan otonomi ruang politik, sebagaimana ekonom, ahli hukum, moralis yang mempertahankan ruang otonomi mereka masing-masing. Yang terpenting adalah ahli politik berpikir dalam batasan kepentingan yang didefinisikan sebagai *power*. Para realis politik bukannya tidak menyadari eksistensi dan relevansi dari standar-standar pemikiran lain, tetapi mereka harus mensubordinasikan standar-standar lain itu ke standar politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Eksplanatif. Data yang dimuat dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu melalui telaah pustaka baik buku, *e-book*, jurnal, koran, majalah, tulisan ilmiah dan akses internet yang bersifat relevan dengan masalah/tema yang diangkat. Pengumpulan data menggunakan cara Telaah Pustaka untuk perspektif yang tepat mengenai masalah yang diangkat dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal, koran, majalah, tulisan ilmiah hingga situs internet. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Penggunaan Drone Dalam Perang

Memasuki tahun 2000an, penggunaan *drone* dalam peperangan menjadi hal yang biasa. Perkembangan *drone* dari tahun ke tahun menyebabkan peralatan perang jenis ini menjadi solusi bagi negara-negara yang berkonflik atau negara yang hanya ingin memperkuat negaranya dari aspek militer. Perkembangan *drone* ini juga telah memicu *Revolution in*

Military Affairs (RMA) dalam bidang teknologi. RMA menurut Andrew Marshall (*United States Department of Defense's Office of Net Assessment*) adalah perubahan besar dalam sifat peperangan yang ditimbulkan oleh penerapan inovasi teknologi baru yang dikombinasikan dengan perubahan drastis dalam doktrin militer, konsep operasional dan organisasi, secara fundamental mengubah karakter dan pelaksanaan operasi militer (www.iwar.org.uk, diakses 15 Agustus 2020). Dari pesawat berawak menjadi pesawat tak berawak yaitu *drone* merupakan salah satu pemicu RMA. *Drone* yang awalnya hanya pengintai berubah menjadi *drone* yang dilengkapi senjata rudal *Hellfire* yang diperuntukkan *targeted killing*.

1. Amerika Serikat

Pada Oktober 2000, direktur CIA George Tenet dan kepala Kontraterorisme Gedung Putih Richard Clarke berpendapat bahwa Predator harus bisa membantu melacak Osama Bin Laden di Afghanistan (slate.com, diakses 13 September 2019). Penerbangan ini merupakan misi pertama *drone* AS. Dalam misi pertama *drone* tahun 2001-2004, pilot yang mengoperasikan *drone* yang hanya dilengkapi dengan kamera pengintai ternyata salah mengidentifikasi sasaran dan mengakibatkan terbunuhnya warga sipil. Pada tahun 2002 sasaran yang disinyalir adalah Osama bin Laden ternyata adalah penduduk sipil yang bernama Daraz Khan. Selain itu dalam misi yang sama, serangan *drone* AS di Afghanistan telah dilakukan sebanyak 4.130 kali telah membunuh 3.923-5.353 jiwa dan terhitung ada 150-367 warga sipil, 36-101 anak-anak (www.thebureauinvestigates.com, diakses 17 Agustus 2020).

2. Israel

Penggunaan *drone* yang dilengkapi oleh senjata oleh Israel pertama kali dilakukan tahun 2004 di Gaza. Kejadian paling parah tercatat pada Desember 2008 hingga Januari 2009, selama 23 hari Israel menyerang Gaza menggunakan *drone* sebanyak 42 kali telah membunuh 87 warga sipil (29 orang diantaranya adalah anak-anak) dan menyebabkan 73 warga sipil luka-luka (Saif, 2014).

3. Inggris

Sejak 2006-2012, Inggris telah menjalankan 2.150 misi menggunakan *drone* di Afghanistan dan Libya. Namun, ada 271 misi dimana Inggris menggunakan *drone* milik AS. Hal ini disebabkan karena Inggris masih terkendala perizinan penggunaan *drone* oleh Kementerian Pertahanan Inggris (Holland, 2015).

4. Pakistan

Pada 7 September 2015, *Burraq* digunakan untuk pertama kalinya dalam operasi militer di Lembah Shawal untuk memerangi kelompok teroris Taliban yang dipimpin oleh Baitullah Mehsud. Penggunaan *drone* oleh Pakistan sama seperti AS yaitu *targeted killing* (tribune.com.pk, diakses 15 September 2020).

5. Nigeria

Penggunaan *drone* dalam perang juga dilakukan oleh Nigeria. Namun, *drone* bersenjata yang digunakan oleh negara ini tidak berasal dari AS tetapi dari China. Nigeria menggunakan *drone* tipe CH-3 dalam perang untuk pertama kali pada tahun 2014 ketika melawan Kelompok Boko Haram yang berada di wilayahnya (www.popsci.com, diakses 15 September 2020).

B. Penggunaan *Drone* oleh AS dalam Konflik Suriah

Selama Perang Sipil Suriah yang dimulai pada 2011, AS awalnya memasok bantuan non-senjata bagi pemberontak yang berasal kalangan militer Suriah seperti makanan dan alat transportasi. Namun dalam perkembangannya bantuan AS bertambah

dengan program pelatihan militer dan senjata untuk kelompok pemberontak. Bahkan Pentagon telah mempersenjatai 15.000 pemberontak, namun akhirnya dihentikan pada awal tahun 2013 setelah menghabiskan dana \$500 juta. Bantuan AS terhadap pemberontak dalam konflik Suriah dimaksud juga agar dapat membantu AS dalam melaksanakan kontraterorisme (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Pada tahun 2013, penggunaan senjata biologis oleh rezim Bassar Al-Assad menambah peran AS di Suriah. Pasukan pemerintah Al-Assad mengklaim bahwa oposisi adalah teroris dan pasukan oposisi menganggap bahwa Bashar Al-Assad adalah teroris yang membantai ribuan bahkan ratusan orang (Hermawan & Nurokhman, 2016).

Pada 26 Agustus 2014, AS mulai mengirim penerbangan pengawasan, termasuk *drone*, ke Suriah untuk mengumpulkan informasi tentang target ISIS. Penerbangan mulai mengumpulkan intelijen yang akan membantu serangan udara di masa depan meskipun serangan udara belum diizinkan pada saat itu. Tidak ada persetujuan yang dicari dari pemerintah Assad untuk penerbangan yang memasuki wilayah udara Suriah (www.salon.com, diakses 15 November 2019).

Pada penggunaan *drone* di Suriah AS berfokus pada wilayah Al-Tabqa, Al-Kharata, Al-Shoula, Al-Taim, Al-Jabseh, Al-Omar, Al-Tanak, Al-Hadhita, Deiro, Deir Ezzor, Mosul, Hit, Raqqa, Sinjar dan Qayyara dengan fokus menghadapi teroris (i.dailymail.co.id, 15 November 2019).

C. Dampak Penggunaan *Drone* dalam Konflik Suriah

1. *Collateral Damage*

a. Korban Sipil

Human Right Watch menerangkan bahwa korban sipil yang telah jatuh di Suriah berada pada kisaran 685 warga sipil angka ini diyakini merupakan sebagian besar dikarenakan oleh *drone*, tetapi dalam jurnalnya tidak disebutkan bahwa penyebabnya murni serangan *drone* jadi ada kemungkinan angka tersebut diakumulasi dengan pesawat berawak (www.hrw.org, diakses 4 Desember 2018).

b. Fasilitas Umum/Hunian Sipil

Menurut data *UNITAR's Operational Satellite Applications Programme* (UNOSAT) melalui visual citra satelit, ada 8 kota besar di Suriah yang mengalami dampak kerusakan paling parah yaitu Aleppo, Damaskus, Daraa, Deir ez Zor, Hama, Homs, Idlib dan Raqqa (towardsdatascience.com, diakses 26 November 2020).

2. Penyalahgunaan *Drone*

Akademisi AS Amy Zegart berpendapat bahwa *drone* dapat berubah dari *targeted killing* menjadi *targeted hurting*, *drone* yang mematikan kelak dapat dirancang dengan teknologi yang tinggi yang bisa menjadi *targeted hurting*. Bila *drone targeted killing* digunakan untuk menghabisi musuh di medan perang maka *targeted hurting* menargetkan keluarga, teman, desa atau sesuatu yang berharga sehingga dapat mempengaruhi kondisi seseorang dalam medan perang (Acheson et al, 2017).

3. Proliferasi Horizontal Penggunaan *Drone*

Ketika AS menjadi pemicu terjadinya perlombaan teknologi di Suriah, pertanyaan besar yang muncul adalah ketika melihat teknologi *drone* ini apakah yang menginginkannya hanya sebuah negara berdaulat, bagaimana dengan *non-state actor*. Ketika dalam sebuah konflik mengalami sebuah kekalahan akibat teknologi baru maka kecenderungan untuk juga memiliki teknologi tersebut sangat besar.

D. **Kepentingan Penggunaan Drone oleh AS dalam Konflik Sruiah**

Dalam *Political Realism*, menuntut sebuah negara untuk mampu melihat semua aspek yang memungkinkan suatu negara agar dapat meningkatkan *power*. Dalam realisme klasik peningkatan *power* sangat berhubungan erat dengan militer tetapi dalam *political realism*, *power* yang dimaksud tidak hanya mengarah kepada militer namun dalam maksud yang lebih luas. Hal ini berkaitan langsung dengan prinsip ketiga dimana negara harus dapat meningkatkan *power* dalam kesempatan apapun dan dalam bentuk apapun, artinya negara harus mampu melihat peluang tersebut dan tidak berfokus pada satu aspek.

Perkembangan teknologi yang pesat juga merupakan salah satu peluang besar bagi AS, keinginan berinovasi dan tujuan yang ingin dicapai akhirnya jatuh pada *drone* sebagai instrumen baru sebagai alat mencapai tujuan. Aspek yang dicapai *drone* sangat berperan dalam dunia militer, namun AS juga melihat aspek lain dari penggunaan *drone* yaitu ekonomi. Kemungkinan yang muncul ini lah yang dimaksud *political realism* sebagai peluang peningkatan *power*.

Power dari *political realism* dimaksud juga demi mempertahankan keamanan nasional yaitu memunculkan rasa aman bagi warga negara AS merupakan salah satu tujuan agar terhindar dari ancaman yang sama seperti kejadian 9/11. Keberadaan *drone* diharapkan mampu menjadi penyelamat bangsa seperti bunyi prinsip kelima yaitu kepentingan dalam *safety/survival*.

1. **Kemampuan dan Teknologi Militer**

Cara yang dianggap AS efektif untuk menyelesaikan masalah ini adalah penggunaan *drone* sebagai salah satu perlengkapan senjata. *Drone* bisa terbang secara langsung ke tempat perang tanpa menyebabkan pilot maupun angkatan darat terkena bahaya. Dengan kata lain dapat menghindarkan jatuhnya korban dari pihak militer AS.

Drone yang memiliki kemampuan siaga, sehingga sangat menguntungkan bagi personel dilapangan yang dapat menjadikan *drone* bukan hanya sebagai alat pengintai tetapi juga sebagai tambahan tenaga sekaligus senjata. *Drone* yang dilengkapi dengan rudal *Hellfire* dengan radius lebih dari 20 meter sudah merupakan ancaman besar bagi kombatan yang ada dilapangan. *Drone* diterbangkan dan terus siaga mengintai sambil mengikuti personel dilapangan dan bila diperlukan *drone* akan melancarkan serangan secara langsung menggunakan pengendali yang dimiliki personel.

Bahkan dalam sebuah video game perang realistis seperti *Call of Duty: Modern Warfare 2*, sebuah *drone* sangat berperan penting dalam peningkatan *power* sebuah kelompok dalam menjalankan misi. Jumlah personel 5 sampai 10 orang dan dengan bantuan sebuah *drone Predator* sudah dapat melakukan penyerangan ke markas teroris secara langsung dan melumpuhkan puluhan kombatan hanya dengan satu rudal *AGM Hellfire*.

2. **Perluasan Kekuasaan Politik (Kontraterorisme)**

Kontraterorisme adalah upaya AS dalam menjaga keamanan nasional dengan mengambil peran utama dalam mengembangkan strategi dan pendekatan terkoordinasi untuk mengalahkan terorisme diluar negeri dengan kerjasama internasional (www.state.gov, diakses 8 Oktober 2020). AS melalui tindakan kontraterorisme telah melakukan kontak dengan Afghanistan, Irak, Tunisia,

Libya, dan Mesir, kini Suriah. Taliban, Jabhah Al Nusra, Hizbullah, Al Sahab, Tentara Mahdi, Al Qaeda dan ISIS merupakan sasaran utama AS. Namun tindakan ini mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang tidak sedikit (Minardi, 2016).

Kontraterorisme memiliki tujuan yang sama seperti prinsip ke 5 dalam *political realism* yaitu menyelamatkan bangsa dari segala ancaman menggunakan *power*. *Power* merujuk pada alat yang digunakan yaitu *drone*.

Drone cenderung legal secara hukum nasional AS, pasca peristiwa 9/11 AS memiliki kebijakan baru yaitu *preemptive strike* dan *military order*. *Preemptive* menyatakan bahwa AS bisa secara sepihak memberikan hak pada dirinya sendiri untuk mengambil tindakan sepihak terhadap apa yang dipersepsikan AS sebagai ancaman, bahkan menggunakan militer bila perlu. Selain itu legalitas ini juga terlihat dalam aturan dalam pasal 51 *United Nation Charter* “*Inherent right of individual or collective self defense until UN security takes action*”. Dengan kata lain bahwa militer AS melalui *drone* tidak sepenuhnya melanggar aturan yang ada (www.americansecurityproject.org, diakses 10 Februari 2020).

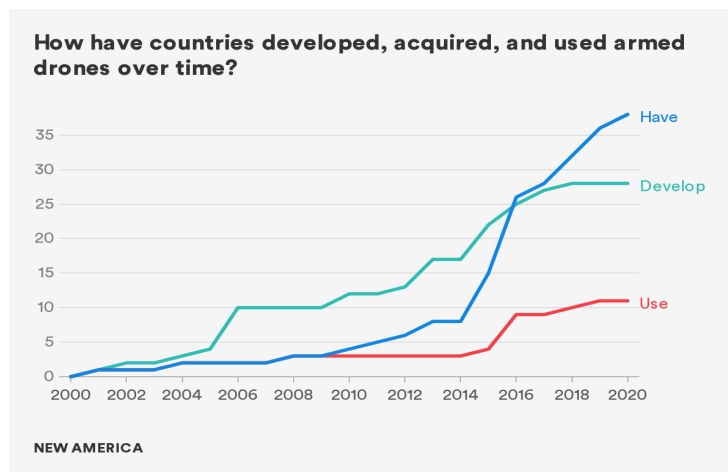
Drone sangat cocok untuk filosofi intervensi militer Obama. Obama tidak menolak menggunakan kekuatan, tetapi ia enggan melemparkan ribuan tentara AS ke medan pertempuran kecuali jika kepentingan vital bangsa dipertaruhkan. Jika AS atau sekutunya memiliki kepentingan dalam konflik dan muncul beberapa ancaman, ia cenderung mengirim pasukan kecil berupa Pasukan Khusus, tim penasihat militer atau alat pamungkas peperangan tak beresiko yaitu *drone*.

3. Pembangunan Kekuatan Ekonomi (Penciptaan Pasar Drone)

a. Ekspor Drone

AS melihat *drone* bukan hanya sebagai senjata yang digunakan dalam perang tetapi juga sebagai lahan pendapatan ekonomi dan itu dapat dilihat dari banyaknya negara yang mengimpor *drone* langsung dari AS. Meskipun harganya yang jauh lebih murah dari pesawat berawak, *drone* memiliki keunikan dan kemudahan tersendiri, dengan kendali remot *drone* pula dianggap seperti memainkan sebuah *video game* tapi dengan kemudahan seperti itu pula yang menarik minat negara lain untuk memilikinya.

AS merupakan pemicu utama dalam penggunaan *drone*, kepemilikan dan negara yang mengembangkan yang diakibatkan oleh kebijakan transparansi yang dilakukan oleh Obama pada tahun 2013 dan bertepatan dengan masuknya AS di Suriah. Transparansi ini memungkinkan adanya keterbukaan mengenai penggunaan *drone*.



Sumber: New America

Sebagai negara dengan kekuatan tempur terbesar didunia tentu saja AS akan menjadi kiblat teknologi perang bagi negara lain, sehingga ketika AS memutuskan mendeklarasikan akan keterbukaan mereka mengenai *drone*, negara lain terpacu untuk memunculkan *drone* mereka sendiri atau berniat membeli dari AS secara langsung baik untuk dimasukkan kedalam jajaran kemampuan tempur negara mereka atau mungkin akan langsung digunakan didalam peperangan.

b. Menghemat Anggaran

Jika dibandingkan dengan pesawat berawak, *drone* jauh lebih murah, contohnya yaitu *Lockheed Martin's F-22 fighter* harganya berkisar US\$ 150 juta, harga dari *F-35s* US\$90 juta dan *F-16* US\$ 56 juta. Sedangkan harga dari *drone* jenis *Reaper* hanya berkisar US\$28.4 juta dan US\$ 5 juta untuk jenis *Predator*, hanya di tambah dengan misil jenis *Hellfire* yang berkisar US\$ 60.000 saja, *drone* bisa beroperasi (www.foreignpolicy.com, diakses 20 Januari 2020).

Ini menandakan bahwa AS bisa menghemat anggaran belanja, karena jika berkaca dari strategi terdahulu di masa Presiden Bush yaitu dengan mengirimkan pasukan militer untuk melawan teroris, menyebabkan AS harus menyediakan banyak dana untuk operasional militer, proses *nation-building*, dan juga AS harus kehilangan pasukan militernya. Terhitung pada Januari 2009, AS kehilangan 637 anggota militernya dalam operasi di Afganistan. Hal ini kurang efektif dan efisien bagi AS, dengan harga yang cukup jauh antara *drone* dan pesawat berawak maka menggunakan *drone* sangat dapat membantu AS menghemat anggaran mereka (Tan, 2019).

Kesimpulan

Penggunaan *drone* bersenjata oleh AS sebagai alat dalam perang memang menimbulkan kecaman dari organisasi Internasional seperti *Human Right Watch* dikarenakan menyebabkan jatuhnya korban sipil. Namun berdasarkan kemampuan teknologi AS di bidang militer sangatlah wajar untuk memaksimalkan kemampuan tersebut untuk memperoleh *power*.

Power sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan berperang AS yang bukan hanya berfokus pada Konflik Suriah tetapi juga menghadapi teroris salah satunya AL Qaeda dan ISIS demi memenuhi kepentingan *counterterrorism*. *Drone* AS dirasa sangat

efisien dan efektif untuk menangani masalah tersebut baik dari segi peningkatan daya tempur maupun dari segi biaya yang dikeluarkan cenderung lebih murah.

Berdasarkan kemampuan tersebut AS melihat peluang yang lebih besar dari produk mereka ini, yaitu membuka pasar *drone* untuk meningkatkan ekonomi dari AS. Dengan memanfaatkan teknologi militer dan melihat secara langsung kemampuan dari *drone* di Suriah melalui *counterterrorism*, dua hal tersebut dapat menunjang penjualan *drone* yang memicu tumbuhnya *economic power*.

Daftar Pustaka

- Acheson, Ray, et al. 2017. *The Humanitarian Impact of Drones*. Women's International League for Peace and Freedom; International Disarmament Institute. Pace University: Artikel 36
- Bergen, Peter, et al. 2017 *International Security In Depth: World of Drones*, New America. <https://www.newamerica.org/in-depth/world-of-drones/>
- Bhaskara, Adhi. 2018. *Tragedi 9/11 dan Perang Abadi Amerika Serikat Terhadap Teror*
- Brooks, R. 2012. *Take Two Drones and Call me in The Morning*. Foreign Policy (daring).
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/12/take_two_drones_and_call_me_in_the_morning?page=0
- Dunne, Tim, Milja Kurki & Steve Smith. 2013. *International Relations Theories Dicipline and Diversity: Third Edition*. Oxford University Press: United Kingdom
- Fahham, A. Muchaddam & A.M Kartaatmaja. 2014. *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*. Politica Vol.5 No.1
- Foust, J. & A.S. Boyle. 2012. *The Strategic Context of Lethal Drones*, American Security Project. <https://www.americansecurityproject.org/the-strategic-context-of-lethal-drones-a-framework-for-discussion/>
- Hermawan, Sulistio & M. Nurokhman. 2016. *Konflik Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Holland, Louisa Brooke. 2015. *Overview of military drones used by the UK armed forces*. House of Commons Library
- Human Right Watch. 2018. *Syria*. <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syria>
- Human Rights Watch. 2016. *Airstrike Transparency We Can't Believe In*. <https://www.hrw.org/news/2016/07/08/airstrike-transparency-we-cant-believe>
- Ibrugger, Lothar. 1998. *The Revolution in Military Affairs*. (NATO Parliamentary Assembly). www.iwar.org.uk/rma/resources/nato/ar299stc-e.html#1
- Kaplan, Fred. 2001. *The First Drone Strike (a weapons system designed to defeat Soviets tanks on the plains of Europe appeared in the sky over Kabul, Afghanistan)*. <https://slate.com/news-and-politics/2016/09/a-history-of-the-armed-drone.html>
- Minardi, Anton. 2016. *United States Counterterrorism on ISIS*. Senior Lecturer (Assoc. Professor) at Department of International Relations Pasundan University, Bandung Indonesia): Vol. 7 No. 2
- Morgenthau, Hans j., Kenneth W. Thompson. 1985. *Politics Among Nations: The Struggle Fot Power And Peace (Sixth Edition)*. Knopf: New York

- Najjar, Ameen. 2016. Damage Caused by the Syrian Civil War: What the Data Say, , Towards Data Science, <https://towardsdatascience.com/damage-caused-by-the-syrian-civil-war-what-the-data-say-ebad5796fca8>
- National Geographic Indonesia. *Kemajuan Teknologi Pencitraan Udara Mampu Selamatkan Banyak Nyawa*. <http://nationalgeographic.grid.id/read/13709106/kemajuan-teknologi-pencitraan-udara-mampu-selamatkan-banyak-nyawa?page=all>
- Pace, Julie. 2014. *AP source: Obama backs surveillance over Syria*. https://www.salon.com/2014/08/26/ap_source_obama_backs_surveillance_over_syria/
- Pentagon Plans for Cuts to Drone Budget. 2014. <https://www.military.com/dodbuzz/2014/01/02/pentagon-plans-for-cuts-to-drone-budgets>
- Professional Drone Indonesia. 2016. *Sejarah dan Perkembangan Pesawat Tanpa Awak (Drone)*. <http://agendrone.com/sejarah-dan-perkembangan-pesawat-tanpa-awak-drone/>
- Saif, Atef Abu. 2014. *Sleepless in Gaza: Israeli Drone War on The Gaza Strip*. Rosa Luxemburg Stiftung: Regional Office Palestine
- Suroso, Indreswari. 2016. *Peran Drone/Unmanned Aerial Vehicle (UAV) STTKD Dalam Dunia Penerbangan*. Sekolah Tinggi Kedirgantaraan
- Tan, A.T.H. 2009. *U.S Against Global Terrorism*. Palgrave Macmillan: New York
- The Bureau of Investigative Journalism. 2016. *Afghanistan: Reported US Air and Drone Strikes*. <http://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/get-the-data-a-list-of-us-air-and-drone-strikes-afghanistan-2016>
- The New York Times. 2013. *Obama's Speech on Drone Policy*. <https://www.nytimes.com/2013/05/24/us/politics/transcript-of-obamas-speech-on-drone-policy.html>
- U.S. Department of State. 2012. *Bureau of Counterterrorism*. <https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/bureau-of-counterterrorism/>